



KEPALA DESA BULAKWARU
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA BULAKWARU
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKWARU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULAKWARU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

- i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- j Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- k Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- m Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- n Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- o Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- p Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fokus Dana Desa Tahun 2024
- q Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- r Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
- s Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
- t Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah
- u Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
- v Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- w Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
- x Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa
- w Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- x Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- y Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- z Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
- za Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
- zb Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
- zc Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
- zd Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum

- ze Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- zf Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa
- zg Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- zh Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah
- zi Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
- zj Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBDes 2024
- zk Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan
Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun
2024
- zl Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan
Lokasi Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024
- zm Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun
2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Untuk Desa
- zn Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- zo Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Aset Desa
- zp Peraturan Desa Nomor Tahun 07 Tahun 2024 Tentang
Penyertaan Modal Desa
- zq Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Dana Cadangan
- zr Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2024 Rencana Kerja
Pemerintah Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAKWARU
Dan
KEPALA DESA BULAKWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BULAKWARU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakwaru Tahun Anggaran 2025 adalah
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.966.061.638,00
2. Belanja Desa	Rp	1.695.574.771,00
Surplus/Defisit	Rp	(270.486.867,00)
3. Pembiayaan		
a. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	286.000.000,00
b. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.513.133,00

Seisih Pembayaan (a-b)	Rp	270.486.867,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

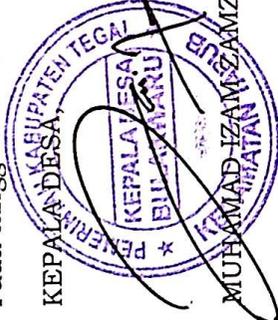
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bulakwaru.

Ditetapkan di : Bulakwaru

Pada tanggal : 05 Januari 2025



Diundangkan di : Bulakwaru

Pada tanggal : 05 Januari 2025

RAQZAH
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA BULAKWARU NOMOR 01 TAHUN 2025